



KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke	: 4 (empat)
Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI/ke-1
Dengan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, KASAU, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II
Hari, Tanggal	: Rabu, 2 Desember 2015
Pukul	: 14.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Drs. Mahfuz Sidik, M.Si
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pemanfaatan lahan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak lain.
Hadir	: 1. orang dari 48 Anggota Komisi I DPR RI 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.IP. beserta jajarannya. 3. KASAU, diwakili oleh WAKASAU Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja beserta jajarannya. 4. Dirut PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, KASAU, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, dan Direktur Utama PT Angkasa

Pura II pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.

II. KESIMPULAN :

1. Komisi I DPR RI menerima penjelasan Sekjen Kemhan, WAKASAU, dan Dirut PT Angkasa Pura II terkait sengketa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) TNI AU di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI mengingatkan agar para pihak yang bersengketa tetap mengedepankan kepentingan nasional yang lebih tinggi demi tetap terjaganya keamanan dan kedaulatan NKRI.
2. Komisi I DPR RI mendorong Kemhan dan TNI AU untuk segera menyelesaikan sengketa sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas.
3. Komisi I DPR RI mendesak Kemhan untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap pemanfaatan pangkalan udara di lingkungan TNI sebagai Bandar Udara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 2 Desember 2015
KETUA RAPAT,

TTD

Drs. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
A-105